



Polemik Kenaikan NJOP dan PBB-P2

Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo

SINGKAWANG — Koalisi Masyarakat Singkawang mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait permintaan tindakan tegas atas kenaikan sepihak Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Singkawang. Dalam surat tersebut, koalisi berharap agar Presiden sebagai pemimpin yang mendengar dan berpihak pada masyarakat kecil dapat memberikan perhatian serius terhadap isu ini, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa birokrasi seharusnya mempermudah, bukan mempersulit rakyat.

Mereka pun mengutip pesan Presiden, "Copot saja, di rumah aja, daripada menyusahkan masyarakat kita." Koalisi menyampaikan bahwa kenaikan NJOP dan PBB-P2 pada tahun 2024 ini tidak mencerminkan semangat tersebut. Pemerintah Kota Singkawang, menurut mereka, telah menaikkan NJOP dan PBB hingga ribuan persen

tanpa adanya sosialisasi yang memadai.

Dido Sanjaya, perwakilan Koalisi Masyarakat Singkawang, menyebut kebijakan ini sebagai beban besar bagi masyarakat kecil dan seolah-olah memaksa rakyat untuk menanggung tekanan finansial yang tidak seharusnya. Dalam surat terbuka itu, koalisi menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan NJOP, yang mereka anggap telah merugikan kesejahteraan masyarakat, merusak stabilitas ekonomi lokal, serta menghambat investasi.

Kebijakan ini diduga dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat, tanpa koordinasi, tanpa sosialisasi, dan bahkan termasuk penetapan pajak pada tanah pemakaman. Koalisi menilai langkah tersebut lebih didorong oleh target insentif dan kepentingan pihak tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.

Koalisi juga menyoroti



ISTIMEWA

DEMONSTRASI: Aksi demo Koalisi Masyarakat Singkawang terkait kenaikan NJOP dan PBB-P2 di Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (23/10).

bahwa penetapan NJOP yang baru ini tidak berdasarkan hukum yang jelas dan tidak sejalan dengan harga pasar, sehingga rakyat kecil terpaksa menanggung konsekuensi dari kebijakan yang dianggap tidak transparan. Kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan semakin memper-

buruk keadaan.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Singkawang mendesak agar Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas demi mengembalikan keadilan bagi masyarakat Singkawang. "Kami memohon Presiden RI Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas

atas persoalan ini. Kami ingin birokrasi di Kota Singkawang kembali pada semangat melayani rakyat, bukan menindas," ungkap Dido.

Koalisi juga menuntut pembatalan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang dianggap memberatkan masyarakat. Meskipun warga telah melakukan aksi protes sebanyak tiga kali berturut-turut, tidak ada respons yang berarti dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, mereka dengan rendah hati memohon agar Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk mengevaluasi kebijakan ini, atau bila perlu, mencopot oknum-oknum yang dianggap menyulitkan kehidupan masyarakat kecil, sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh Presiden dalam kabinet. "Semoga Bapak Presiden berkenan memberikan perhatian untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Singkawang, demi Indonesia yang lebih adil dan makmur," pungkasnya. (har)